

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Non Profit di Desa Sumber Jaya, Muaro Jambi

Diterima: 14 Juli 2023

Direview: 18 Juli 2023

Disetujui: 26 Juli 2023

Asrini¹, *Yorina An'guna Bansa², Deka Veronica³, Ratih Rosita⁴

Universitas Muhammadiyah Jambi, Jalan Bandar Lampung Simpang IV Sipin Kota Jambi¹²³⁴

e-mail: yorinabansa@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan sekaligus praktek bagaimana menyusun laporan keuangan organisasi non profit. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi interaktif. Hasil dari pelatihan ini adalah mendapatkan ilmu menyusun laporan yang baik dan benar sesuai undang-undang sehingga dengan melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada regulator, donatur dan pertanggungjawaban kepada publik. Adapun dampak yang diperoleh dari kegiatan PKM ini adalah Desa Sumber Jaya sudah memiliki laporan keuangan yang memadai sesuai dengan laporan keuangan untuk organisasi non-profit.

Kata kunci: laporan keuangan, organisasi non profit, penyusunan laporan

ABSTRACT

The purpose of this community service is to provide knowledge as well as practice on how to prepare financial reports for non-profit organizations. The method used is the lecture method and interactive discussion. The result of this training is gaining knowledge of preparing good and correct reports in accordance with the law so that by preparing these financial reports it can provide information to regulators, donors, and accountability to the public. The impact obtained from this PKM activity is that Sumber Jaya Village already has adequate financial reports in accordance with financial reports for non-profit organizations.

Keyword : *financial reports, non-profit organizations, preparation of reports*

PENDAHULUAN

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari entitas nirlaba tersebut. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, misalnya penerimaan sumbangan. Namun demikian, dalam praktik entitas nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk, sehingga sering kali sulit dibedakan dengan entitas bisnis pada umumnya. Pada beberapa bentuk entitas nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan,

entitas nirlaba tersebut mendanai kebutuhan modalnya dari utang, dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atas jasa yang diberikan kepada publik. Akibatnya, pengukuran jumlah, saat, dan kepastian aliran kas masuk menjadi ukuran kinerja penting bagi para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba tersebut, seperti kreditor dan pemasok dana lainnya. Entitas semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya. Para pengguna laporan keuangan entitas nirlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan entitas bisnis, yaitu untuk menilai: (a) jasa yang diberikan oleh entitas nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; (b) cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek kinerja manajer. Kemampuan entitas nirlaba untuk terus memberikan jasa dikomunikasikan melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut. Laporan ini harus menyajikan secara terpisah aset neto baik yang terikat maupun yang tidak terikat penggunaannya. Pertanggung jawaban manajer mengenai kemampuannya mengelola sumber daya entitas nirlaba yang diterima dari para penyumbang disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aset neto.

Laporan keuangan organisasi non profit/nirlaba/sector publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sector publik. Laporan keuangan ini merupakan implikasi bagi manajemen sector publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sector publik secara efektif. Akuntansi sector publik harus menghadapi tantangan dalam pelaporan keuangan ini yaitu mampukah akuntansi menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitori akuntabilitas manajemen, akuntabilitas politik, dan akuntabilitas kebijakan.

Pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Sumber Jaya merupakan Desa yang sangat luas memiliki tiga Dusun yaitu Pemetung, dusun pedataran, dan dusun perbatasan. Desa Sumber Jaya memiliki Jumlah penduduk sebanyak 550 jiwa. Desa Sumber Jaya secara fisik merupakan desa yang luas dengan masyarakat yang aktif. Desa ini sering mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Anggaran Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD). Secara ekonomis

masyarakat Desa Sumber Jaya merupakan kalangan menengah kebawah yang kehidupan sosialnya sangat harmonis dan teratur.

Bantuan dari pemerintah pusat yang sering diterima oleh Desa Sumber Jaya membuat desa tersebut dituntut kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban terhadap publik. Pertanggungjawaban kepada publik dapat diinformasikan melalui laporan keuangan. Kondisi saat ini Desa Sumber Jaya belum memiliki laporan keuangan yang memadai sesuai dengan laporan keuangan untuk organisasi non profit.

Organisasi nirlaba merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk memberikan jasa atau layanan dan tidak bertujuan untuk mencari laba (keuntungan) dari aktivitas operasionalnya. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi nirlaba terhadap pengelolaan sumber daya. Di Indonesia, penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba khususnya Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan terhadap transparansi keuangan dan bertujuan untuk menyeragamkan penyajian laporan keuangan desa sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami, relevan, andal, dan memiliki daya banding yang tinggi. Organisasi nirlaba/sector publik khususnya desa dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, maka disusun target dan luaran yang diinginkan. Detail dari target dan luaran tersebut tercantum sebagai berikut.

Adapun target yang ingin dicapai dalam program pengabdian masyarakat ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membina Desa Sumber Jaya sebagai desa yang tertib administrasi dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
2. Menjadikan Desa Sumber Jaya sebagai desa binaan dalam semua aspek kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi, sehingga bisa menjadi desa percontohan.

Sedangkan luaran yang diharapkan dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya program pengabdian masyarakat Universitas Muhammadiyah Jambi khususnya dalam bidang pelaporan keuangan.
2. Hasil program pengabdian masyarakat ini disebarluaskan dalam bentuk pamflet dan diseminasi pada desa-desa lain.

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan ini dilaksanakan selama enam hari pada tanggal 9 Mei – 15 Mei 2023. Jumlah peserta pelatihan adalah 25 orang. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah desa Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat desa dan Karangtaruna. Perangkat desa dan Karangtaruna sebagai pengguna anggaran mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan sumber dana kepada pemerintah dan masyarakat luas sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Metode penerapan Iptek dalam kegiatan ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan:

a. Ceramah

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep-konsep mengenai organisasi nirlaba dan laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi nirlaba.

b. Pendampingan

Metode pendampingan dimaksudkan memberikan contoh kasus kepada peserta untuk menyelesaikan praktik penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba.

c. Praktik Manual

Praktik manual dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyusun kembali laporan keuangan organisasi tersebut berdasarkan data historis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

d. Perkenalan Praktik dengan Software

Perkenalan praktik dengan software dimaksudkan untuk membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba secara komputerisasi dengan kriteria apabila praktik manual telah dikuasai.

Keterkaitan kegiatan ini dengan Universitas Muhammadiyah Jambi adalah Universitas Muhammadiyah Jambi melalui pelaksanaan kegiatan ini mampu mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diamanahkan oleh undang-undang. Bagi Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dan Pemerintah kegiatan ini akan mewujudkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga kepercayaan pengelolaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara tepat.

Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui review berkala dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Kehadiran dan partisipasi peserta (sasaran) pada setiap kegiatan sejak persiapan sampai berakhirnya kegiatan mencerminkan keinginan dari peserta untuk mengetahui dan menerapkan hasil kegiatan ini.
2. Setiap laporan yang selesai dikerjakan dievaluasi.
3. Setiap kendala atau kesulitan dicarikan pemecahan masalahnya.
4. Di akhir kegiatan semua kegiatan dievaluasi.

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama 6 hari, dengan teknis pelaksanaan di lapangan selama 5 hari dan kegiatan persiapan selama 1 hari. Mekanisme pelaksanaan kegiatan ini ditampilkan dalam bar-chart berikut ini:

Tabel 1. Mekanisme pelaksanaan kegiatan

Kegiatan	Hari ke-1	Hari ke-2	Hari ke-3	Hari ke-4	Hari ke-5	Hari ke-6
Kegiatan Persiapan (dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat)						
Penjelasan Teoritis, Praktik, dan Pendampingan						
Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Desa Sumber Jaya						
Evaluasi Berkala						
Perkenalan Praktik dengan Software						
Evaluasi Akhir Kegiatan						

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Sebagaimana kita ketahui bersama organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi kepada profit yang sering juga disebut sebagai organisasi bisnis. Organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata di pengaruhi oleh profit (biasanya menggunakan istilah selisih lebih) dan jika hal tersebut terjadi selisih lebih tersebut akan digunakan untuk stakeholder atau kepentingan publik.

Di dalam organisasi nirlaba kepemilikan tidak seperti pada kepemilikan pada organisasi bisnis, artinya bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual dialihkan, atau ditebus kembali dan dana sumber daya organisasi nirlaba biasanya berasal dari sumbangan para donatur tanpa mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan. Walaupun donatur tidak mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan mereka, mereka tetap menginginkan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin tahu bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan publik buka untuk di gelapkan.

Menyusun laporan keuangan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan apalagi memang untuk diterapkan pada organisasi nirlaba yang mempunyai scope yang kecil dan biasanya sumberdayanya kurang. Namun, hal tersebut bukan menjadi alasan karena organisasi nirlaba dapat membuat laporan keuangan sederhana tanpa harus mengacu kepada standar pelaporan keuangan entitas nirlaba. Organisasi nirlaba yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah Desa Sumber Jaya yang dalam pengelolaan keuangannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP. No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan PP. No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yg bersumber dari APBN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Harapannya dengan melakukan penyusunan laporan keuangan tersebut dapat memberikan informasi kepada regulator, donatur dan pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai pengelolaan dana desa laporan keuangan yang harus dibuat Desa Sumber Jaya, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi diantaranya: Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa; Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Entitas nirlaba yang lainnya dapat menerapkan PSAK 45 sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan PSAK 45 laporan keuangan entitas nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk satu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Walau pelaporan akuntansi mengenai entitas nirlaba telah jelas diatur dalam PSAK 45 tetap saja masih banyak organisasi nirlaba di Indonesia yang belum sanggup untuk melaksanakannya. Seperti yang telah disebutkan di atas, keterbatasan sumber daya dan organisasi yang scope nya kecil menjadi salah satu faktor yang membuat pelaksanaan PSAK 45 belum banyak diterapkan.

Beberapa organisasi nirlaba telah mampu menerapkan PSAK 45 baik full mengacu pada PSAK 45 atau yang tidak hanya mengacu kepada PSAK 45 saja, beberapa organisasi nirlaba menggunakan pedoman tambahan hal ini mengingat organisasi nirlaba mempunyai karakteristik sendiri. Terdapat pula beberapa organisasi nirlaba yang telah menjalankan fungsi auditor independen dan menggunakan basis akrual dan mereka mem-publish laporan tersebut kedalam web masing-masing.

Sebagaimana yang telah penulis katakan sebelumnya organisasi nirlaba masih banyak yang belum menjalankan fungsi akuntabilitasnya dengan baik dan benar karena memang hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Sering kali kita berhadapan dengan organisasi nirlaba, dan perkembangannya juga cukup pesat di Indonesia terutama di bidang keagamaan dan pendidikan. Gereja-gereja baru berdiri, lembaga infaq yang semakin menjamur dan meningkat pesatnya jumlah sekolah dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat akan organisasi nirlaba berkembang pesat. Melalui perkembangan tersebut dan kemudahan akses informasi membuat publik sadar bagaimana organisasi nirlaba melakukan pengelolaan keuangan, bagaimana pemerintah sebagai regulator mengawasi kegiatan organisasi nirlaba. Memang pada akhirnya semua hal tersebut akan bertumpu pada masyarakat bagaimana untuk menyikapi hal tersebut dan melakukan aksi tentunya.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ini adalah berupa penerapan iptek. Penerapan iptek dalam kegiatan ini adalah penyusunan laporan keuangan organisasi non-profit yaitu di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Sumber Jaya sering menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Dana Desa, Anggaran Desa, sehingga membuat desa tersebut dituntut kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban terhadap publik. Pertanggungjawaban kepada publik dapat diinformasikan melalui laporan keuangan. Kondisi setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat saat ini adalah Desa Sumber Jaya sudah memiliki laporan keuangan yang memadai sesuai dengan laporan keuangan untuk organisasi non-profit.



Gambar 1. Foto warga desa saat menyimak paparan materi

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut :

1. Keberhasilan target jumlah peserta pelatihan.
2. Ketercapaian tujuan pelatihan.
3. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan.
4. Kemampuan peserta dalam penguasaan materi

Dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat IbM ini masih terdapat beberapa permasalahan. Program ini belum dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat umum dikarenakan peserta adalah sebatas pada perangkat desa dan karangtaruna. Untuk rencana tahap selanjutnya akan dilakukan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pembinaan UMKM milik desa, sehingga tercipta desa binaan yang dapat dijadikan Desa Percontohan.

SIMPULAN

Program pelatihan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jumlah peserta sesuai dengan targetan awal menunjukkan antusiasme peserta terhadap

kegiatan ini. Keseluruhan materi yang direncanakan yang merupakan rencana awal maupun berdasarkan permintaan mitra telah dilaksanakan secara baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kekurangan yaitu perangkat desa dan karang taruna tidak membawa laptop yang dapat menunjang kelancaran pelatihan. Adapun saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki program selanjutnya diantaranya adalah :

1. Waktu pelaksanaan program yang lebih lama dan berkesinambungan,
2. Dilakukan pelatihan dan implementasi langsung pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Oktaviani. 2003. "*Desentralisasi Pengambilan Keputusan, Pengendalian Akuntansi dan Kinerja Kantor Dinas*". Program studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang (tidak dipublikasikan).
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Bodnar, George H., and Hopwood, William, S.,. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 9. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Gatot, Indra.2005. "*Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah di Indonesia*". CV.Duta Nusindo. Semarang.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Jogjakarta: Penerbit Andi Offset. 2002.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Sukirman, Djadja. 2008. Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Baik. *Makalah yang disampaikan pada Seminar Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan*. Jambi. 24 Mei 2008.